

Buku

Ali, Zainudin, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ana Rokhimatussa'dyah dan Suratman, 2009, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta.

Assaf Razin dan Efraim Sadka, 2006, *Foreign Direct Investment: Analysis of Aggregate Flows*, Princeton University Press.

Asshiddiqie, Jimly, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Attamimi, A. Hamid S., 1992, *Teori Perundang-undangan Indonesia, Makalah pada Pidato Upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap di Fakultas Hukum UI*, Jakarta.

Busroh, Abu Daud, 2001, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.

HR, Ridwan, 2010. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Penerbit Rajawali Pers, Yogyakarta.

Hans Kelsen, 1995, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Empirik-Deskriptif* (terj.) oleh Somardi, Rimdi Pers, Jakarta.

Ibrahim, Johny, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.

Ilmar, Aminuddin, 2017, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Kairupan, David, 2014, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Lusiana, 2012, *Usaha Penanaman Modal di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Librayanto, Romi, 2008, *Trias Politica Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, PUKAP, Makasar.

Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

PEMBERLAKUAN ONLINE SYSTEM SUBMISSION (OSS) BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 24 TAHUN 2018
TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2014 TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH

Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

NOVANDA JANSSONIUS, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Philipus M. Hadjon, 2001, *Pembagian Kewenangan Pusat dan Daerah*, (Makalah Semiloka Rekonstruksi Politik Hukum Otonomi Daerah Yang Berbasis Pada Kemandirian dan Demokratisasi di Daerah, Malang.

Redi, Ahmad, 2018, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2016, *Penerapan Teori Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Depok.

Salim HS dan Budi Sutrisno, 2018, *Hukum Investasi di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Depok.

Sembiring, Sentosa, 2018, *Hukum Investasi*, CV. Nuansa Aulia, Bandung.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Judimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Olivier De Schutter, Johan Swinnen and Jan Wouters, 2013, *Foreign Direct Investment and Human Development: The law and economics of international investment agreements*, Routledge, New York.

Peraturan Perundangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47241);

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelaksanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

PEMBERLAKUAN ONLINE SYSTEM SUBMISSION (OSS) BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 24 TAHUN 2018
TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2014 TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

NOVANDA JANSSONIUS, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden
Nomor 90 Tahun 2007 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal.

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Internet

Bisnis.com, “Ini 4 Poin Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang Diberlakukan Pemerintah”,
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20180328/9/755251/ini-4-poin-percepatan-pelaksanaan-berusaha-yang-diberlakukan-pemerintah>, diakses 25 April 2019.

Bisnis.com, “Opini:Upaya memperbaiki Izin Usaha Dengan OSS”,
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20181212/9/868904/opini-upaya-memperbaiki-izin-usaha-dengan-oss>, diakses 8 Agustus 2019.

Hukumonline, ”Potensi Masalah Hukum Pasca Terbitnya PP Perizinan Terintegrasi”
:<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b46e638b08e5/potensi-masalah-hukum-pasca-terbitnya-pp-perizinan-terintegrasi>, diakses 26 Maret 2019.

Hukumonline, “Dinilai Tabrak Aturan Sana Sini, PP OSS Harus Direvisi”,
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bcc0df105bb5/dinilai-tabrak-aturan-sana-sini--pp-oss-harus-direvisi>, diakses 27 Maret 2019.

Hukumonline, “Catatan Problematika Perizinan dan Investasi di Tahun 2018”,
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c29cd28afab2/catatan-problematika-perizinan-dan-investasi-di-tahun-2018>, diakses 26 Maret 2019.

BPHN, “Ini 12 Permasalahan yang Hambat Kemudahan Berusaha”,
<https://bphn.go.id/news/2018110913222224/BPHN-Ini-12-Permasalahan-yang-Hambat-Kemudahan-Berusaha>, diakses 25 April 2019.

MediaIndonesia, ”Kontroversi PP No 24 Tahun 2018”,
<https://mediaindonesia.com/read/detail/175843-kontroversi-pp-no-24-tahun-2018>, diakses 20 April 2019.



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

**PEMBERLAKUAN ONLINE SYSTEM SUBMISSION (OSS) BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 24 TAHUN 2018
TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2014 TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH**

Katadata, "Kemudahan Berusaha Turun BKPM Kita Hilang Fokus Setahun Terakhir",
NOVANDA JANSSONIUS, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id>
<https://katadata.co.id/berita/2018/11/02/kemudahan-berusaha-turun-bkpm-kita-hilang-fokus-setahun-terakhir>, diakses 26 April 2019.

Bappenas, "Presiden Jokowi Permudah Perizinan Perlancar Investasi",
<https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/presiden-jokowi-permudah-perizinan-perlancar-investasi/>, diakses 30 April 2019.

Setkab.go.id "Perpres Percepatan Berusaha:Pemerintah Bentuk Satuan Tugas di Tingkat Nasional Hingga Daerah", <https://setkab.go.id/perpres-percepatan-berusaha-pemerintah-bentuk-satuan-tugas-di-tingkat-nasional-hingga-daerah/>, diakses 7 Agustus 2019.